

PENDAMPINGAN AKREDITASI LEMBAGA PAUD DI IGTKI WONOSEGORO Sidik Nuryanto¹, Oka Irmade²

PG-PAUD Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
alfiananuryanto@gmail.com¹, irmadeoka@gmail.com²

ABSTRAK

Saat ini pemerintah terus mendorong lembaga PAUD untuk mengajukan akreditasi. Beberapa lembaga di Kecamatan Wonosegoro belum mengajukan dengan alasan (1) Guru masih awam tentang penggunaan teknologi terkait upload dokumen di sispena, (2) Guru mengalami kebingungan terkait dengan penyediaan jenis jenis dokumen setiap butir akreditasi (3) Ketidapkahaman guru terhadap format dokumen untuk setiap butir akreditasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di lembaga yang tergabung di IGTKI Wonosegoro, Boyolali yang menggabungkan teori dan praktek. Tujuannya membantu tingkat ketercapaian lembaga PAUD yang sudah terakreditasi. Hasilnya terjadi persamaan persepsi tentang akreditasi, siap dokumen akreditasi, dan upload dokumen di Sispena.

Kata Kunci: Akreditasi, PAUD, Sispena, Dokumen akreditasi

ABSTRACT

Currently the government continues to encourage early childhood education institutions to apply for accreditation. Some institutions in Wonosegoro, Boyolali have not submitted the reasons (1) Teachers are still unfamiliar with the use of technology related to uploading documents in sispena, (2) Teachers are confused about the provision of types of documents for each item of accreditation (3) Teachers' lack of understanding of the format of documents for each item accreditation. This community service activity is carried out at an institution incorporated in IGTKI Wonosegoro, Boyolali which combines theory and practice. The aim is to help the level of achievement of PAUD institutions that have been accredited. The result is a common perception of accreditation, accreditation documents ready, and uploading documents in Sispena.

Keywords: Accreditation, PAUD, Sispena, accreditation documents



A. PENDAHULUAN

Akreditasi belakangan ini banyak diperbincangkan bagi para guru baik dalam forum resmi maupun nonformal. Isu akreditasi ternyata membuat para guru kaget dan takut dengan persiapannya yang menyita waktu, tenaga dan biaya. Alasan ketakutannya karena akreditasi adalah hal yang sangat menentukan mutu atau kualitas lembaganya, sehingga harus bersiap untuk kerja lembur. Kerja keras untuk mempersiapkan berkas/dokumen yang jumlahnya tidak sedikit dalam rentang 2 tahun terkahir. Ditambah lagi sarana serta prasarana harus dilengkapi supaya ketika asesor akreditasi datang dapat terkesan.

Lembaga PAUD termasuk satuan pendidikan yang terkena kebijakan untuk segera melakukan akreditasi. Mulai dari Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Taman Kanak-Kanak (TK). Seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa seluruh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia harus terakreditasi pada 2020. Muhadjir Effendy dalam Rakornas BAP PAUD dan PNF di Yogyakarta juga berpesan akan pentingnya PAUD sebagai landasan dari pendidikan. "Pendidikan PAUD merupakan landasan dari pendidikan, sehingga sebagai landasan itu sangat penting karena menentukan keberlanjutan pendidikan selanjutnya. Sehingga sebagai pemangku kepentingan itu (keberadaan) pendidikan anak usia dini adalah benar-benar penting. Semoga rakor ini bisa menghasilkan pembahasan bagi program dan strategi layanan akreditasi yang berkualitas.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mencantumkan Pendidikan Nonformal sebagai salah satu jalur pendidikan dan diperlakukan setara dengan Pendidikan Formal. Hal tersebut mempunyai konsekuensi pemberlakuan penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi, yang pelaksanaannya

diserahkan kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF), sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah (PP RI) no. 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan ke dua dari PP RI no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59 Tahun 2012 tentang BAN PAUD dan PNF.

Akreditasi PAUD adalah sebuah upaya penilaian dari pemerintah untuk mengukur kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu merupakan bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh Pemerintah. Dalam <http://www.acics.org> menambahkan bahwa akreditasi *Helps determine if an institution meets or exceeds minimum standards of quality* (membantu menentukan apakah suatu institusi memenuhi atau melampaui standar kualitas minimum). Mengukur mutu atau kualitas pendidikan sesuai yang dipersyaratkan dalam 8 standar akreditasi. Diantaranya (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Akreditasi memberikan dorongan dalam peningkatan mutu lembaga. Seperti halnya dalam tulisan Fithri Radhiyatul dan Wewen Anggraini (2018) yang bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Mutu Sekolah TK Melalui akreditasi se-kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Hasilnya adalah minimnya sosialisasi tentang akreditasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya sumberdaya manusia dan biaya operasional menjadikan mutu pendidikan juga rendah.

Pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dilakukan oleh BAN PAUD PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal). Akreditasi ini dilakukan dengan



tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah (kementrian agama: 2008). Di dalam websitenya menyampaikan tentang manfaat akreditasi

1. Meningkatkan mutu program dan satuan PNF;
2. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi sebagai umpan balik dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan kinerja satuan PNF;
3. Mendorong satuan PNF agar selalu berupaya meningkatkan mutu program dan lembaganya secara bertahap, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, propinsi, regional, nasional, bahkan internasional;
4. Memperoleh informasi dan data yang handal dan akurat dalam rangka pelaksanaan bantuan dan program PNF yang memperoleh dukungan dari pemerintah dan masyarakat

Saat ini di tahun 2019 para guru PAUD sedang sibuk untuk dapat memenuhi target yang diimpikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tahun 2020 semua lembaga sudah terakreditasi. Perkumpulan guru seperti IGTKI, Himpaudi, IGABA dan lainnya ramai menggelar pelatihan, pendampingan, seminar atau workshop yang intinya untuk dapat sukses akreditasi. Adapun di dalam pelaksanaan persiapan akreditasi tersebut banyak kendala yang dialami bagi para guru maupun tenaga administrasi lembaga PAUD.

Rendahnya pengetahuan tentang teknologi sebagai masalah yang banyak dialami oleh guru PAUD. Padahal saat ini dokumen atau borang akreditasi harus di upload di dalam sistem akreditasi online yang namanya Sispena. Tidak sedikit guru yang belum *familiar* dengan komputer dan jaringan internet, sehingga kebijakan tersebut serasa memberatkan. Belum lagi aktivitas

untuk merubah hardfile menjadi softfile dengan cara di scan yang begitu memberatkan bagi mereka.

Kendala lain adalah guru mengalami kebingungan terkait format dokumen untuk setiap butir akreditasi. Di dalam setiap butir akreditasi telah memberikan panduan berupa kisi-kisi yang tujuannya untuk mempermudah guru dalam membuatnya. Namun meskipun sudah diberi kisi-kisi guru masih bingung karena disuguhi beberapa jenis dokumen dari berbagai lembaga yang formatnya berbeda. Keadaan itu membuat guru menjadi bingung dan dampaknya adalah tidak jadi mengerjakan dokumen akreditasi. Padahal setiap butir akreditasi tidak menuntut untuk sama formatnya yang terpenting adalah komponen/ itemnya dapat terpenuhi.

Bentuk dokumen setiap butir akreditasi belum dimengerti secara penuh oleh para guru. Misalnya tentang dokumen bukti sosialisasi visi dan misi kepada orangtua. Para guru jika ditanya hal tersebut yang diserahkan kepada asesor hanya sekedar potonya. Padahal lebih dari itu ada undangan, daftar hadir dengan paraf, notulen rapat dan foto.

Permasalahan yang diuraikan sebelumnya tadi, juga dialami oleh para guru di lingkungan Kabupaten Boyolali khususnya kecamatan Wonosegoro. Makanya penulis tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan akreditasi lembaga PAUD di IGTKI Wonosegoro. Kegiatannya meliputi (1) Penyamaan persepsi tentang pentingnya akreditasi, (2) Penyiapan dokumen 8 standar, dan (3) Upload dokumen di Sispena. Targetnya guru PAUD diharapkan memiliki keterampilan untuk dapat menyiapkan dokumen yang memenuhi kriteria ALS (Ada, Lengkap, dan Sesuai) yang jumlahnya 60 butir. Serta dapat mengunggah dokumen akreditasi di aplikasi sispena. Luarannya adalah guru PAUD (1) Memiliki pemahaman tentang pentingnya akreditasi dalam peningkatan mutu lembaga, (2) dapat menyusun dokumen akreditasi 8 standar, (3) Dapat upload

dokumen akreditasi pada aplikasi sispena.

B. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut dapat ditanggulangi melalui beberapa hal berikut, yaitu:

- 1 Memberikan pelatihan dan workshop tentang pentingnya akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan
- 2 Workshop praktek pembuatan dokumen akreditasi
- 3 Pendampingan guru upload dokumen di aplikasi sispena

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah meliputi pelatihan dan praktik, tanya jawab, dan ceramah, Sasaran dari kegiatan ini adalah para guru PAUD dari IGTKI kecamatan Wonosegoro kabupaten Boyolali.

C. TAHAPAN KEGIATAN

a. Tahap Pendahuluan

Tahap ini akan dipersiapkan surat ijin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan materi, alat dan bahan.

b. Tahap Sosialisasi dan Audiensi

Sosialisasi mengenai pelatihan persiapan akreditasi dengan menggunakan aplikasi sispena dan memberikan penjelasan terkait pembuatannya, cara mencari contoh dan penggunaan komputer.

c. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Pada tahap ini pelatihan dilakukan dengan metode ceramah partisipatif, interaktif, dan dialogis. Sehingga peserta pelatihan dapat dengan mudah memahami dan menerapkannya dalam penyusunan perangkat pembelajaran mereka masing-masing. Proses pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktek secara langsung.

d. Tahap Evaluasi Akhir

Evaluasi kegiatan berupa mengevaluasi kegiatan pelatihan pendampingan akreditasi dengan aplikasi sispena.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pentingnya Akreditasi

Akreditasi bukan hal yang perlu ditakuti dan dihindari, namun harus dilakukan. Secara umum akreditasi merupakan proses penjaminan mutu sebuah lembaga. Menurut Edward Salis (2011;53) mutu dipandang sebagai suatu produk layanan dan harus memenuhi suatu kualifikasi tertentu yang berasal dari layanan itu sendiri. Sehingga mutu dikaji secara konsep tual memiliki dua aspek yaitu pertama, menyesuaikan diri dengan spesifikasi, kedua memenuhi kebutuhan pelanggan.

Menurut Maria Corazon Diaz Segismundo.(2017) Akreditasi sebagai kegiatan penjaminan kualitas yang akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu akreditasi juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan akan kelas dunia pendidikan di lingkup ASEAN. Keberadaan lembaga pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan akreditasi. Mengingat dengan label “lembaga sudah terakreditasi” memiliki nilai jual yang tinggi di mata masyarakat. Adapun pentingnya akreditasi diantaranya, adalah

Bagi lembaga

- Untuk mengetahui sejauh mana mutu lembaga, atau memenuhi kriteria dari standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu karena hasil akreditasi merupakan salah satu indikator mutu (quality indicator) dan referensi dalam mengambil keputusan (decision making reference) untuk berbagai kebutuhan termasuk peningkatan mutu (quality improvement) pada masa yang akan datang (<https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id>).
- Sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kualitas lembaga untuk periode selanjutnya
- Bentuk kepatuhan terhadap peraturan Kementerian Pendidikan.

Bagi pemerintah



Sebagai tindak lanjut amanah konstitusi tersebut pemerintah menetapkan kebijakan mutu yang tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dijadikan dasar penetapan variabel, indikator, dan butir penilaian dalam instrumen penilaian akreditasi

Bagi masyarakat

Akreditasi mencerminkan mutu lembaga. Hasil akreditasi akan menjadi acuan masyarakat untuk memilih lembaga sebagai mitranya. Tentunya orangtua akan memilihkan tempat il bersekolah bagi anaknya, lembaga yang memiliki akreditasi baik. Menurut Becton Loveless dalam <https://www.educationcorner.com> orangtua yang menitipkan anaknya dilembaga pendidikan yang teakreditasi akan mendapatkan jaminan kualitas. Baik kualitas dari sarana dan prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, dan kegiatannya



lapangan. Mereka dinilai mempunyai kompetensi dan pengalaman yang lebih dalam dunia pendidikan anak usia dini. Dalam menjalankan tugas harus objektif, adil, bebas kepentingan dan tidak menerima suap.

Permendikbud Nomor 52 tahun 2015 sebagai dasar akreditasi PAUD dan Non Formal yang merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 59 tahun 2012. (BAN) PAUD dan PNF telah menyusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal tersebut tertuang

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Terdapat 8 standar dengan 40 butir instrumen yang harus dilengkapi lembaga dalam pengajuan akreditasi. Berikut ini dokumen standar akreditasi:

1. Standar Pencapaian Perkembangan Anak

Dokumennya berupa berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, data tingkat pencapaian perkembangan anak, dan deteksi pencapaian perkembangan anak

2. Standar Isi

Dokumen KTSP, acuan KTSP, evaluasi KTSP, dan perilaku keselamatan diri

3. Standar Proses

Dokumen yang perlu diupload adalah program semester, Rencana pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), Rencana pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), program holistik, keterlibatan orang tua, dan pengawasan pembelajaran

4. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Dokumen yang perlu diupload adalah Ijazah, piagam pelatihan, piagam pelatihan

5. Standar Sarana dan Prasarana

Dokumen yang perlu diupload adalah alat peraga edukatif (APE) luar dan dalam, sarana kebersihan, surat tanah, status tanah, ruangan, dan instalasi

6. Standar Pengelolaan

Pada standar pengelolaan silahkan persiapkan dokumen-dokumen Visi Misi dan Tujuan Lembaga, RKT (Rencana Kerja Tahunan), Kaldik (Kalender Pendidikan), Struktur Organisasi, Deskripsi Tupoksi, Panduan Pelaksanaan, Layanan menurut kelompok usia, Lama belajar perhari, lama belajar perminggu, Daftar kehadiran PTK, dan Supervisi satuan.

7. Standar Pembiayaan

Pada Standar Pembiayaan, silahkan persiapkan dokumen-dokumen Keberadaan sumber pembiayaan pertahun satuan PAUD, Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Satuan (RAPBS), Penyelenggaraan

program pembelajaran, Pembiayaan pengembangan SDM, Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana, Pembiayaan pendidikan yang harus dikeluarkan untuk peserta didik, dan Pembukuan terkait pembiayaan yang dimiliki.

8. Standar Penilaian

Pada Standar Penilaian Pendidikan, silahkan persiapkan dokumen-dokumen Penilaian perkembangan anak, Penilaian harian terhadap capaian perkembangan anak, dan Laporan hasil penilaian terhadap capaian perkembangan kepada ortu peserta didik dengan frekuensi



pelaporan.

Gambar 2. Peserta Upload Dokumen

Setelah mengetahui tentang jumlah standar dan butir instrumen akreditasi, lembaga (asesi) harus menyiapkan dokumen yang mendukung. Dokumen merujuk kepada setiap butir instrument akreditasi. Jadi supaya memudahkan dalam pembuatan dan penyusunannya maka dokumen dibuat sejumlah butir akreditasi (40 butir). Dokumen itu nanti sebagai bahan bagi asesor untuk melihat sejauh mana ketercapaian setiap butir instrumen akreditasi. Dokumen juga sebagai bukti yang mendukung program atau kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

c. Syarat Menyusun Dokumen Akreditasi

Dalam penyusunan dokumen menggunakan seharusnya

1. Prinsip ALS

- Ada (antara dokumen dan kegiatan ada/ pernah dilakukan)
- Lengkap (dokumen tersebut harus lengkap yang mencirikan /

menggambarkan dokumen yang dimaksud)

- Sesuai (dokumen tersebut harus sesuai dengan yang diminta oleh instrumen akreditasi)

2. Kerjakan yang ditulis

Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan di sekolah tentu mengikuti program kerja yang dibuat setiap tahunnya. Program kerja tersebut sudah ditulis dan dicanangkan setiap tahunnya, makanya harus kita lakukan sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan begitu akan mempermudah guru dalam mengidentifikasi kegiatan sekolah yang menunjang akreditasi.

3. Tulis yang dikerjakan

Pekerjaan guru PAUD tidak lah berkuat dengan pembelajaran saja, namun banyak kegiatan yang tidak selesai apabila dikerjakan di jam sekolah. Makanya setiap aktivitas, pekerjaan, maupun rapat yang telah dilakukan harus selalu ditulis atau didokumentasikan secara rapi. Tujuannya untuk kerapian administrasi dan rujukan kegiatan tahun depan, dan menunjang akreditasi.

4. Bisa dibuktikan dan ditelusuri

Kegiatan yang telah ditulis dan dilakukan harus ditunjang dengan dokumentasi berupa foto atau video. Ini sebagai bukti yang kuat bilamana asesor akreditasi meminta bukti kegiatan. Cara pembuktian dan penelusuran dapat dilakukan dengan beberapa langkah

- Menempel foto dalam satu bandel laporan yaitu mulai proposal, laporan kegiatan, dokumentasi
- Menyimpan dokumentasi ke dalam file komputer dengan pemberian nama, misalnya "dokumentasi studi banding jakarta, 25 Mei 2017".
- Menyimpan file dokumentasi secara online, misalnya dengan google drive atau sejenisnya. Sehingga sewaktu waktu bisa dibuka dimana saja.

5. Scan Dokumen

Dokumen yang ada selanjutnya discan/ dirubah menjadi softfile dengan ukuran maksimal 2MB yang kemudian di



upload di SISPENA (sistem aplikasi akreditasi)

d. SISPENA

Sispena adalah sistem penilaian akreditasi PAUD dan PNF yang berbasis online. Jadi semua proses akreditasi mulai dari pendaftaran dan penerimaan sertifikat dilakukan dengan mengunjungi website banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena.

Untuk syarat masuknya lembaga harus memiliki NPSN dan mengisi data Dapodik. Sispena merupakan kemajuan teknologi di bidang pendidikan dengan optimalisasi teknologi dan mengurangi kertas. Seperti yang diungkapkan Chu, Reynolds, Tavares, Notari, & Lee (2017) dunia pendidikan juga sedang mengalami perubahan besar terkait kualitas dan relevansi pendidikan serta penguasaan keterampilan abad ke-21 yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi.

Lembaga atau asesi yang akan mengajukan akreditasi, harus melalui beberapa tahapan yaitu (a) Pendaftaran, (b) Pengisian EDS PA (3) Penilaian EDS PA, (4) Visitasi, (5) Validasi, dan (6) Pengumuman. Sispena juga merupakan tempat untuk mengupload dokumen dokumen pengajuan akreditasi (8 standar). Selain itu asesi juga harus mengupload syarat umum dan khusus terlebih dahulu yaitu: Syarat Umum berupa Surat Permohonan Akreditasi, Memiliki Surat Izin Operasional. Syarat Khusus: Jumlah peserta didik, Sertifikat kompetensi pendidik, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

E. KESIMPULAN

Akreditasi merupakan usaha untuk penjaminan mutu sebuah lembaga, seperti halnya akreditasi PAUD. BAN PAUD PNF sebagai pihak yang melakukan penilaian akreditasi telah mengeluarkan kebijakan dengan adanya Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Melalui pendampingan akreditasi di lembaga IGTKI Wonosegoro ini para guru memiliki pemahaman tentang pentingnya akreditasi PAUD, lebih siap dengan dokumen syarat untuk maju

akreditasi, serta dapat mengupload dokumen di Sispena



Gambar 3 Foto pasca kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional. 2016. Perkembangan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal 2008 s/d 2016. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
- Becton Loveless. *Is Accreditation Meaningful in Early Childhood Programs?* <https://www.educationcorner.com/> Diunduh 20 agustus 2019
- Chu, S. K. W., Reynolds, R. B., Tavares, N. J., Notari, M., & Lee, C. W. Y. (2017). *21st Century Skills Development Through Inquiry-Based Learning: From Theory to Practice*. Singapore: Springer <https://doi.org/10.1007/978-981-10-2481-8>
- Edward Sallis, (2011), manajemen Mutu Terpadu Pendidikan, Yogyakarta, IrcisoD
- Fithri Radhiyatul dan Wewen Anggraini. 2018. Peningkatan Mutu Sekolah TK Melalui Akreditasi Se-Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal PAUD Lectura Dini*, Vol 2, No 1, Oktober 2018
- Maria Corazon Diaz Segismundo. 2017. Measuring Accreditation Experience: Impact on the Quality of Education of Selected ASAS Member-Schools In Luzon and the NCR. *International Journal of Education and Research* Vol. 5 No. 7 July 2017.



Republik Indonesia. 2008. Pedoman Akreditasi Madrasah, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama. Jakarta: Kementrian Agama

<http://www.acics.org>. Accrediting Council For Independent Colleges And School.
<http://www.acics.org/students/content.aspx?id=4320> Diunduh pada tanggal 17 Agustus 2019

<https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/b erita/mengapa-akreditasi-penting>.
Diunduh 14 Agustus 2019